



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANTUL



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 27 Februari 2025
Kepala Pelaksana,



AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196807201996031003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kementrian dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa rerata seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 109,62%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (140,97%), yaitu: Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan; sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Tinggi** (78,26%), yaitu : Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I. PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Pembentukan OPD	10
C. Susunan Organisasi.....	11
D. Keragaman SDM	11
E. Isu Strategis.....	14
F. Cascading Kinerja.....	14
G. Peta Proses Bisnis.....	15
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis	18
1. Tujuan dan Sasaran	19
2. Kebijakan, Strategi dan Program	19
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	23
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	24
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
1. Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	27
2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	49
C. Akuntabilitas Anggaran	60
D. Efisiensi Sumber Daya.....	62
BAB IV. PENUTUP	63

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Kompetensi	11
Tabel 1. 2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	17
Tabel 2. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel 2. 2 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	20
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	23
Tabel 2.5 Program Pendukung Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	24
Tabel 2.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024	24
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	27
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana.....	27
Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024	27
Tabel 3. 5 Penilaian Progres Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	29
Tabel 3. 6 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2024	36
Tabel 3. 7 Tahapan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan.....	38
Tabel 3. 8 Progres Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPB.	39
Tabel 3. 9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan (satuan menit)	49
Tabel 3.10 Daftar Pengadaan Sarpras Kebakaran dan APD Tahun 2024.....	53
Tabel 3. 11 Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	57
Tabel 3. 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	59
Tabel 3.13 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024	61
Tabel 3. 14 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	61
Tabel 3. 15 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	62

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	11
Gambar 1. 2 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar 1. 3 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia	13
Gambar 1. 4 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia	13
Gambar 1. 5 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Gambar 1. 6 Sebaran ASN Berdasarkan Golongan	14
Gambar 1. 7 Skema Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15
Gambar 1. 8 Proses Bisnis Sub Urusan Bencana	16
Gambar 1. 9 Proses Bisnis Sub Urusan Kebakaran	16
Gambar 3. 1 Asistensi dengan BNPB	30
Gambar 3. 2 Paparan Akhir Dokumen Kajian Risiko Bencana	30
Gambar 3.3 Sosialisasi tatap muka.....	31
Gambar 3. 4 Penggantian Papan Informasi Bencana	31
Gambar 3.5. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana	32
Gambar 3.6. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana	32
Gambar 3. 7 Pengadaan rambu kebencanaan.....	33
Gambar 3. 8 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	34
Gambar 3. 9 Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi	34
Gambar 3. 10 Pekerjaan Interior Ruang Pusdalops PB	35
Gambar 3. 11 Pengadaan Monitor Pusdalops PB	35
Gambar 3. 12 Pengecatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami Poncosari	36
Gambar 3. 13 Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2024	36
Gambar 3. 14 Aktivitas Pengembangan SPAB di SMP Negeri 1 Sanden	37
Gambar 3. 15 Aktivitas Pengembangan SPAB di SMP Negeri 2 Srandakan	37
Gambar 3.16 Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC PB lintas Sektor Kabupaten Bantul	38
Gambar 3.17 Koordinasi TRC lintas sektor.....	38
Gambar 3.18 Pelatihan Drone Air	38
Gambar 3.19 Pelatihan Public Speaking	38
Gambar 3. 20 Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	38
Gambar 3.21 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	40
Gambar 3.22 Rapat Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	41
Gambar 3.23 Surat Keputusan Bupati Bantul terkait Penetapan Status Darurat Bencana Tahun 2024	41
Gambar 3.24 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024.....	42
Gambar 3.25 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024	42
Gambar 3.26 Koordinasi Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2024	43
Gambar 3.27 Rapat Pembahasan Draft Raperbup Pedoman Pembentukan FPRB	44
Gambar 3.28 Rapat Tim Data BPBD Kab. Bantul.....	45
Gambar 3.29 Aktivitas Penilaian Indeks Ketangguhan Desa	46
Gambar 3.30 Bimbingan Teknis Pascabencana.....	47
Gambar 3.31 Koordinasi Penanganan Pascabencana.....	47
Gambar 3. 32 Standar Nasional Indonesia SNI 8040:2017 tentang Sirine Peringatan Dini Tsunami ..	48
Gambar 3.33 Rapat Koordinasi Internal Pemadam dan Penyelamatan	51
Gambar 3.34 Proses pemadaman kebakaran	51
Gambar 3.35 Proses pemadaman kebakaran	52
Gambar 3.36 Proses Penyusunan Standarisasi dan Pendataan Sarpras	53
Gambar 3.37 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	54
Gambar 3.38 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	56
Gambar 3.39 Proses Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	56

Gambar 3.40 Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	57
Gambar 3. 41 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.....	58
Gambar 3. 42 Pelaksanaan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	59
Gambar 3. 43 <i>Animal Rescue</i> dan <i>Human Rescue</i>	60

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Gempa bumi dengan kekuatan 5,9 SR pada tanggal 27 Mei 2006 memiliki nilai historis tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Bantul, bencana ini mengakibatkan ribuan masyarakat bantul menjadi korban dan kerugian harta benda yang besar. Dengan semangat dan budaya kegotongroyongan masyarakat Bantul dapat bangkit dengan cepat, dan hanya membutuhkan waktu 2 (dua) tahun.

Banyaknya korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan oleh gempa 27 Mei mengindikasikan masyarakat maupun pemerintah Bantul belum siap dan Tangguh dalam Menghadapi bencana. Empat tahun setelah gempa, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Bantul bersama DPRD Kabupaten Bantul membuat Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Sehingga dalam tahap ini, pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki lembaga yang bertugas khusus dalam penanggulangan Bencana di masa-masa mendatang.

Pada Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menjadi Badan Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan melaksanakan fungsi penunjang sebagai koordinator, komando dan pelaksana dalam bidang penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

B. Pembentukan OPD

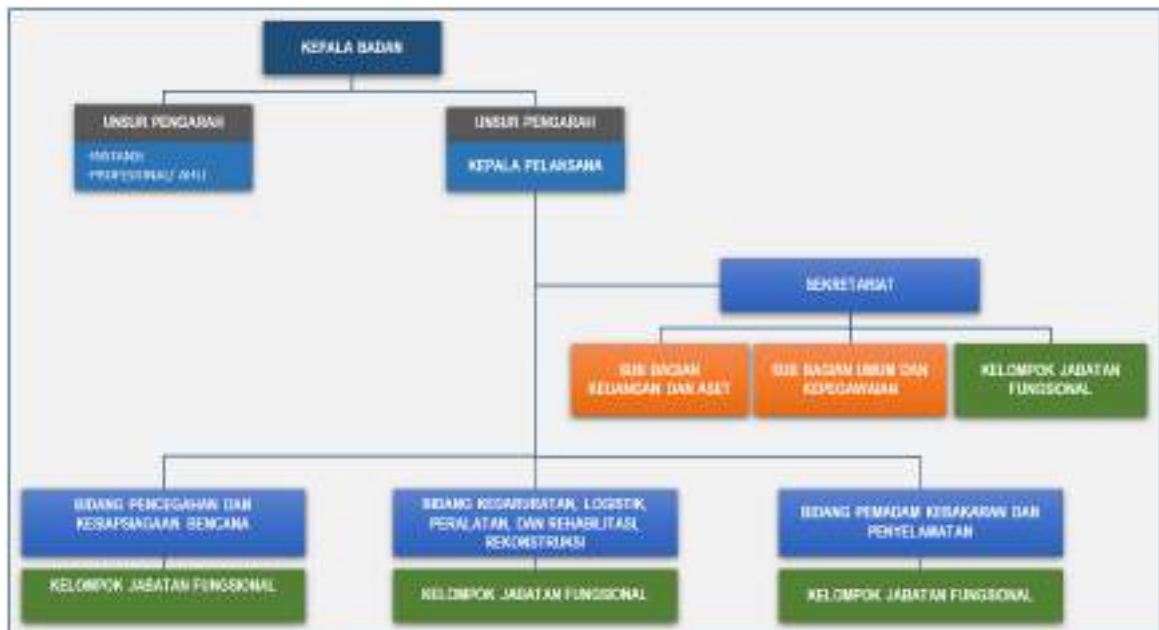
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kementrian dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul memiliki tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kementrian dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - (1) Kepala Pelaksana
 - (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Keuangan dan Aset;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - (4) Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
 - (5) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 188 personil dengan rincian 25 orang berstatus ASN dan 153 personil Non ASN.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang Ada	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi
A.	Jabatan Struktural				
1	Kepala Pelaksana	1	S-1	1	S-2
2	Sekretaris	1	S-1	1	S-1
3	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana	1	S-1	1	S-2
4	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan	1	S-1	1	S-2
5	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	S-1	1	S-1
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S-1	1	S-1

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang Ada	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1	S-1	1	S-1
B. Jabatan Fungsional					
1	Perencana Ahli Muda	1	S-1	1	S-2
2	Perencana Ahli Pertama	1	S-1	-	-
3	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	2	S-1	-	-
4	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	3	S-1	2	S-1; S-2
5	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	4	S-1	-	-
6	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	2	S-1	-	-
7	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	2	S-1	-	-
8	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	3	S-1	-	-
9	Analisis Kebakaran Ahli Madya	2	S-1	-	-
10	Analisis Kebakaran Ahli Muda	6	S-1	3	S-1; S-2
11	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	10	S-1	3	S-1
12	Pemadam Kebakaran Penyelia	4	SMA/K	-	-
13	Pemadam Kebakaran Mahir	24	SMA/K	-	-
14	Pemadam Kebakaran Terampil	48	SMA/K	-	-
15	Pemadam Kebakaran Pemula	72	SMA/K	49	SMA/K
16	Arsiparis Mahir	2	D-3	-	-
17	Arsiparis Terampil	2	D-3	1	D-3
18	Pranata Komputer Terampil	2	D-3	-	-
C. Pelaksana					
1	Penelaah Teknis Kebijakan	9	S-1	3	S-1
2	Pengelola Data dan Informasi	5	D-3	1	D-3
3	Pengadministrasi Perkantoran	7	SMA/K	6	SMA/K
4	Operator Layanan Operasional	4	D-3	-	-
5	Pengelola Umum Operasional	4	D-3	-	-
6	Penata Layanan Operasional	2	D-3	-	-
Jumlah		228		76	

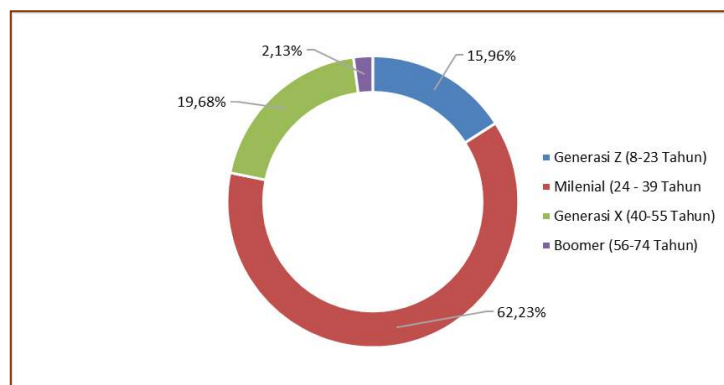
Berdasarkan tabel 1.1 masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 153 personil. Upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan mengoptimalkan personil Non ASN sejumlah 109 orang. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

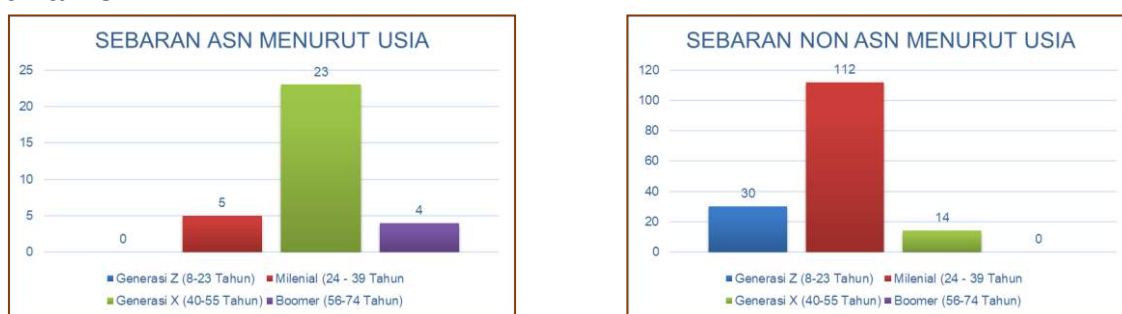
Sehubungan dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah laki-laki atau sebesar 85,95% atau 159 orang dan sisanya perempuan sebanyak 26 orang atau 14,05% dari total seluruh personil.

Berdasarkan klasifikasi menurut Willienn H Frey, personil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didominasi oleh Generasi Milenial atau Generasi Y sebanyak 62,23%, disusul oleh Generasi X, Generasi Z, dan yang paling sedikit adalah Generasi Boomer.



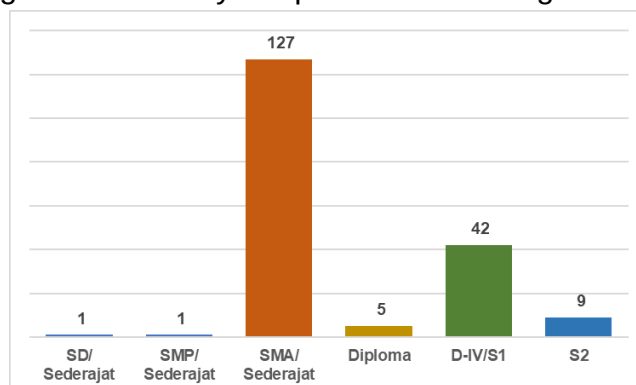
Gambar 1. 3 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia

Komposisi usia yang didominasi oleh generasi milenial memberikan banyak keuntungan dari sisi penggunaan teknologi dan keterbukaan akan perubahan yang dinamis.



Gambar 1. 4 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia

Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Masih terdapat 1.08% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 68,65% sudah berpendidikan sekolah menengah dan 30,27% berpendidikan tinggi. Lebih detailnya dapat dilihat dalam gambar 1.5 berikut.



Gambar 1. 5 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 56,25% disusul Golongan II sebanyak 25%, Golongan IV sebanyak 12,50% dan paling sedikit Golongan I sebesar 6,25%.



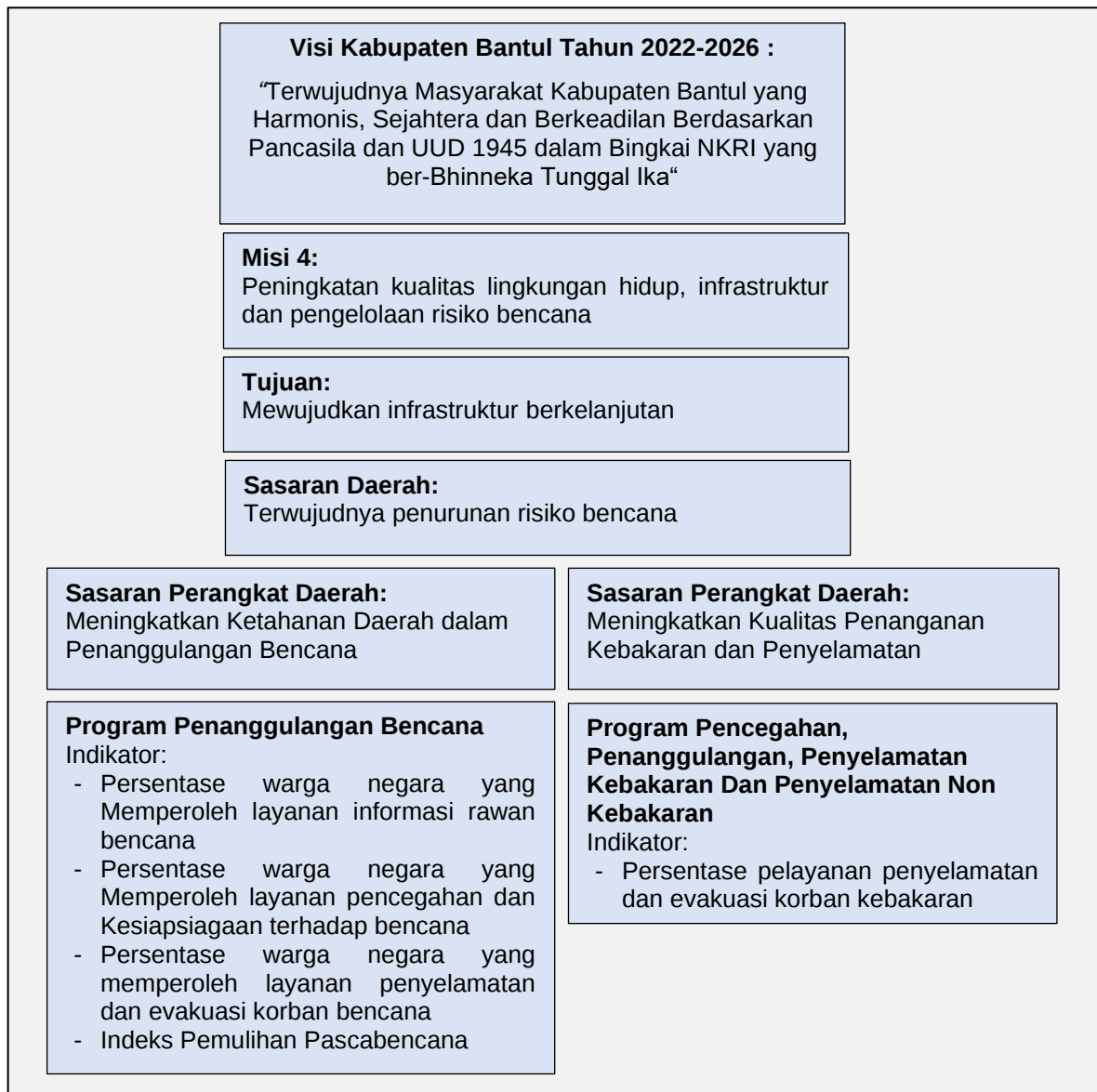
Gambar 1. 6 Sebaran ASN Berdasarkan Golongan

E. Isu Strategis

- Penguatan aspek pencegahan yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini bencana;
- Tren meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses dan tahapan pembangunan;
- Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau '*build back better, safer and sustainable*' harus menjadi perhatian utama;
- Mengoptimalkan pendekatan *PENTAHELIXS* (Pemerintah, Lembaga Usaha, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

F. Cascading Kinerja

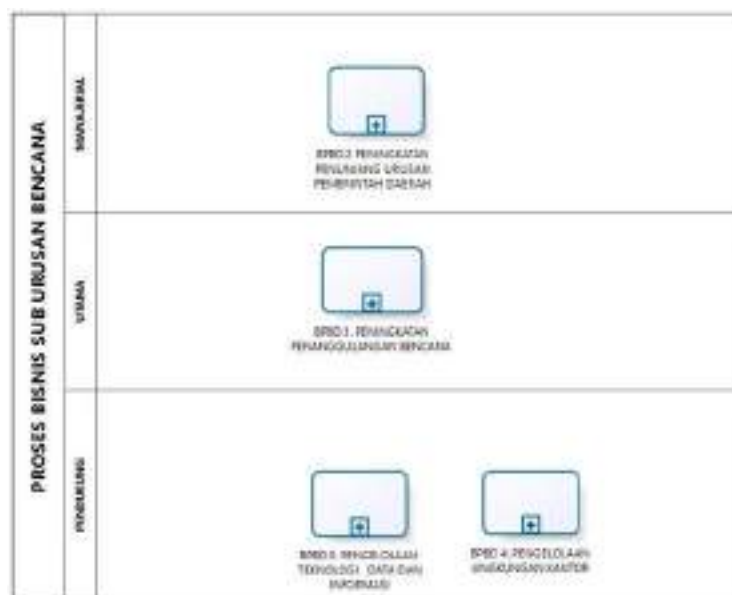
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



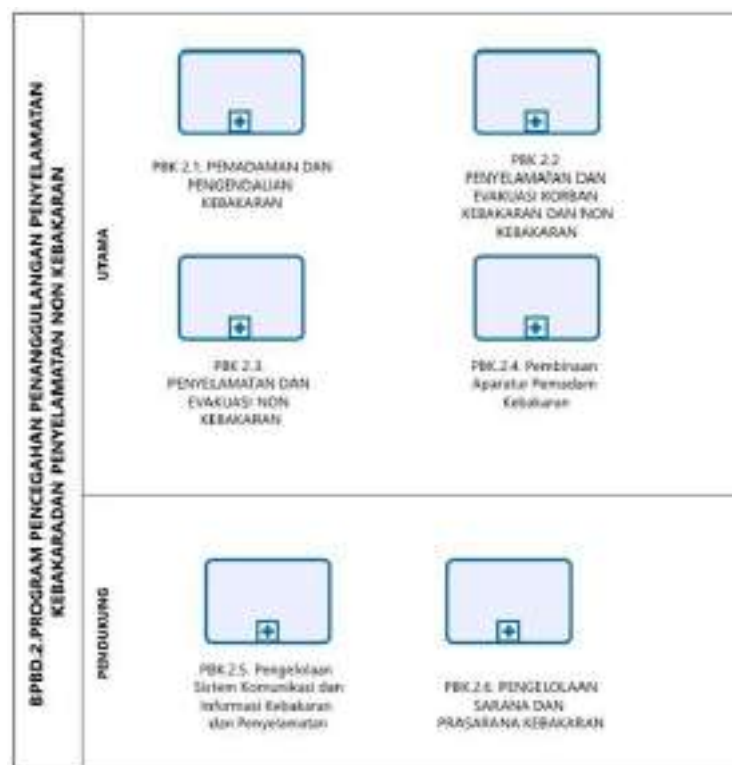
Gambar 1. 7 Skema Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah:



Gambar 1. 8 Proses Bisnis Sub Urusan Bencana



Gambar 1. 9 Proses Bisnis Sub Urusan Kebakaran

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/526.A/Ev.SAKIP/2024 tanggal 19 Maret 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-Langkah Tindak Lanjut
1	Pada tahun yang akan datang agar lebih baik dalam menyusun perencanaan sub kegiatan dan dalam melaksanakannya supaya deviasi antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran tidak melampaui 10%.	- Monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan atas pelaksanaan sub kegiatan mengacu pada target kinerja dan keuangan serta Rencana Anggaran Kas yang sudah disusun. - <i>Reward and Punishment</i> kepada PPTK atas ketepatan atau keterlambatan pelaksanaan Sub Kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022- 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

MISI 4: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana

1. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tujuan adalah Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan; sasaran yang daerah yang di dukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu terwujudnya penurunan risiko bencana. Sedangkan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana; dan Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Indeks Ketahanan Daerah (IKD); dan Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan.

Tabel 2. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
		Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber: Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul 2021-2026

2. Kebijakan, Strategi dan Program.

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana			
Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	- Penguatan kebijakan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana - Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD.
		Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	- Reviu berkala peta bahaya, kerentanan dan kapasitas - Penguatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi (Renkon) dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
		Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	- Penguatan sistem pendataan bencana daerah - Peningkatan kapasitas personil - Peningkatan cakupan dan kapasitas pengelolaan logistik dan peralatan
		Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	- Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana - Penguatan kapasitas Kawasan melalui peningkatan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana; Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana - Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
		Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	- Optimalisasi pelaksanaan mitigasi struktural dan non struktural
		Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	- Penguatan Dokumen Rencana Kontinjensi dalam Peraturan Kepala Daerah - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana - Peningkatan Kapasitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Komando Terintegrasi melalui peningkatan cakupan dan kualitas gladi posko dan gladi lapang
		Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	- Perkuatan sistem pemulihan pasca bencana yang meliputi pemulihan infrastruktur fisik, sosial, ekonomi, dan sumberdaya alam
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Standarisasi prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri - Pengadaan prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
		Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Peningkatan kapasitas personil melalui sertifikasi kompetensi - Pelaksanaan gladi Rencana Operasi (RenOps) secara berkala dan berkesinambungan

Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi	- Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) sampai tingkat Desa/Kalurahan dan bangunan obyek vital lainnya - Implementasi Incident Command System (ICS)
Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.	- Reviu berkala peta bahaya kebakaran - Peningkatan cakupan sosialisasi dan literasi pencegahan kebakaran - Penguatan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah - Peningkatan cakupan dan kualitas inspeksi peralatan proteksi kebakaran - Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan - Peningkatan peran dan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penanggulangan Bencana.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber: Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Sejak tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.kab-bantul.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Realisasi
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	angka	0,92	I I III IV	- - - 0,72*
2.	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	menit	14,42	I I III IV	- - - 8,5*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Tabel 2.5 Program Pendukung Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.035.394.267
2.	Program Penanggulangan Bencana	2.658.408.700
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.607.348.500
Jumlah		17.301.151.467

Sumber: Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul 2021-2026

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
2.	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sumber: Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus disusun di level perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar 2. 1 Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,57	0,93	0,72	77,42	0,95	75,79
2	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	8,19	14,4	8,50	140,97	14,36	140,81

Sumber : BPBD diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa rerata seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 109,62%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana merupakan kunci dalam penurunan risiko bencana. Pengukuran ketahanan daerah melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilaksanakan sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hasil pengukuran IKD tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,57	0,93	0,72	77,42	0,95	75,79

Sumber : Diolah BPBD tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang belum optimal. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 0,93, realisasi sebesar 0,72, tercapai 77,42% atau bernilai kinerja **Tinggi**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,95 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 75,79% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 menunjukkan hasil yang belum optimal disebabkan masih belum optimalnya 2 prioritas perhitungan IKD yaitu: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Rincian hasil Perhitungan IKD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024

No	Prioritas	Nilai IKD		Peningkatan/ Penurunan (%)
		2023	2024	
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,96	0,84	-12,50
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80	0,80	0,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,87	0,84	-3,45

No	Prioritas	Nilai IKD		Peningkatan/ Penurunan (%)
		2023	2024	
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63	0,81	28,57
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,62	0,70	12,90
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,47	0,75	59,57
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,30	0,50	66,67
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,57	0,72	26,32

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2025

Berdasarkan hasil evaluasi dalam IKD Tahun 2024, Kabupaten Bantul masih perlu peningkatan di prioritas yaitu: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Realisasi IKD tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 26,32% dari tahun 2023. Peningkatan terbesar berasal dari Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 66,67% dan 2 prioritas mengalami penurunan yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan; dan Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik.

Capaian Indeks Ketahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 merupakan capaian dengan peningkatan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain di wilayah DIY. Kenaikan IKD Kabupaten Bantul tahun 2024 mencapai 26,32% dari tahun 2023 atau 304,29% lebih tinggi dari rerata kenaikan IKD Kabupaten Kota se DIY sebesar 8,65%. Rincian IKD wilayah DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 dan 2024 di Wilayah DIY

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun		Peningkatan/Penurunan (%)
		2023	2024	
1	D.I.Yogyakarta	0,66	0,72	9,09
2	Bantul	0,57	0,72	26,32
3	Kulon Progo	0,65	0,64	-1,54
4	Gunungkidul	0,73	0,77	5,48
5	Sleman	0,70	0,77	10,00
6	Kota Yogyakarta	0,67	0,69	2,99

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024 dan 2025

Permasalahan:

1. Kelembagaan BPBD belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontinjensi, dan Sistem Kerja di Bidang penanggulangan bencana belum seluruhnya dilegalkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
3. Koordinasi lintas Sektor dalam penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan.

Solusi:

1. Pengisian unsur pengarah BPBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penguatan legalitas dokumen di bidang penanggulangan bencana secara bertahap.

3. Optimalisasi fungsi koordinasi dan komando dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pembentukan dan penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang melibatkan seluruh *Stakeholder*
- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di bidang penanggulangan bencana dengan melibatkan lembaga pendidikan dan penelitian;

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana dengan indikator

- Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2024 menargetkan sebesar 35% tercapai sebesar 35%;
- Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%;
- Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%.

program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan ini adalah Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan target 65% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.268.736.000,- terealisasi Rp.263.641.000,- atau 98,10%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.200.765.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.198.965.000,00 atau 99,10 %. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal dengan target 1 dokumen tercapai sebesar 0,9 atau mencapai 90%. Dengan rincian progres sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Penilaian Progres Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana

No	Target Capaian	Lingkup	Mutu Layanan	Bobot (%)	Capaian (%)
1.	Penyediaan Dokumen KRB	a. Waktu Pelaksanaan	Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan rencana biaya	2,5	2,5
		b. Profil Kebencanaan Kabupaten/Kota	1. Profil Hidrometeorologi Daerah	2,5	2,5
			2. Profil Geologi Daerah	2,5	2,5
			3. Profil Ekonomi, Sosial dan Budaya Daerah	2,5	2,5
			4. Profil Kesehatan Masyarakat	2,5	2,5
			5. Profil Bencana Kabupaten/Kota	2,5	2,5
		c. Album Peta	1. Peta Ancaman masing-masing bencana	2,5	2,5
			2. Peta Kerentanan Daerah	2,5	2,5

No	Target Capaian	Lingkup	Mutu Layanan	Bobot (%)	Capaian (%)
2.	Legalitas Dokumen KRB	d. Indeks Risiko Bencana	3. Peta Kapasitas Daerah	2,5	2,5
			4. Peta Risiko masing-masing ancaman	2,5	2,5
			5. Peta Risiko multi ancaman	2,5	2,5
			6. Menggunakan peta skala 1:50.000 untuk Kabupaten dan peta skala 1:25.000 untuk Kota	2,5	2,5
			1. Analisa potensi jumlah jiwa terdampak masing-masing ancaman per Desa/Kelurahan	2,5	2,5
			2. Analisa potensi kerugian ekonomi (dalam rupiah) yang mungkin timbul dari masing-masing ancaman per Desa/Kelurahan	2,5	2,5
			3. Analisa potensi kerusakan lingkungan (dalam hektar) yang mungkin timbul dari masing-masing ancaman per Desa/Kelurahan	2,5	2,5
			4. Rekomendasi pengelolaan risiko bencana	2,5	2,5
		a. Keterwakilan	Peserta diskusi publik minimal setingkat Kepala Seksi di Pemerintahan atau sederajat, yang berasal dari perwakilan: 1) pemerintah, 2) masyarakat, 3) dunia usaha, 4) akademisi dan 5) jurnalis	7,5	7,5
			1. Kesepakatan data dan peta dasar yang digunakan	7,5	7,5
		b. Berita Acara	2. Kesepakatan peta ancaman yang digunakan	7,5	7,5
			3. Kesepakatan nilai kapasitas yang digunakan	7,5	7,5
			4. Rekomendasi pengelolaan risiko bencana	7,5	7,5
			5. Rekomendasi pembaruan dokumen KRB	7,5	7,5
			c. Dokumen Legal	1. Dokumen legal KRB yang disepakati oleh seluruh komponen pemerintah dan non pemerintah	7,5
		2. Dokumen perencanaan daerah yang disesuaikan dengan KRB		7,5	0
Total Kinerja				100	90



Gambar 3. 1 Asistensi dengan BNPB



Gambar 3. 2 Paparan Akhir Dokumen Kajian Risiko Bencana

(2). Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.67.971.000,- terealisasi Rp.64.676.000,- atau 95,15%. Indikator sub kegiatan ini adalah: Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai

Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya dengan target sebesar 250 orang tercapai sebesar 250 orang atau 100%.

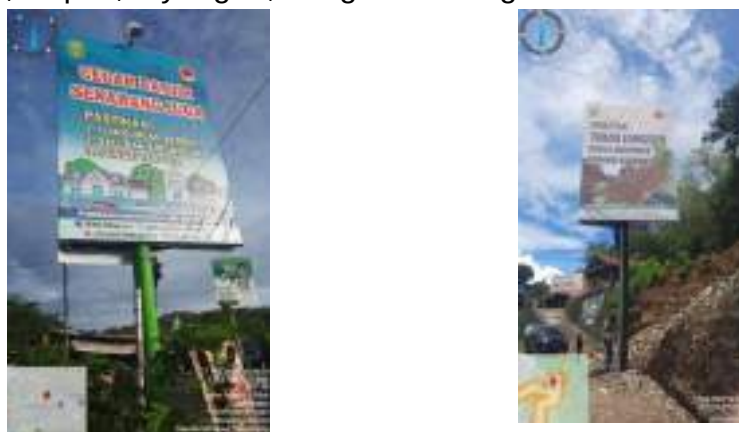
Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) meliputi Sosialisasi Mitigasi Bencana, Pergantian Materi Baliho, Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana dan Peringatan Refleksi Gempa. Output dari sub kegiatan ini adalah jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun. Waktu pelaksanaannya adalah pada bulan Februari sampai dengan Oktober dengan lokasi mencakup semua kalurahan di Kabupaten Bantul.

Sosialisasi mitigasi bencana dilakukan pada tanggal di Rumah Makan Warung Omah Sawah 25 Juni 2024. Narasumber berasal dari BPBD Bantul dan Difagana selama 3 JPL. Materi yang disampaikan oleh narasumber BPBD terkait Implementasi Kalurahan Tangguh Bencana dan materi yang disampaikan oleh Bp Sunarto dari Difagana DIY adalah tentang Tata Cara dalam Pemberian Pertolongan pada Penyandang Disabilitas dalam Situasi Darurat disertai dengan praktek. Peserta yang diundang berjumlah 30 orang yang berasal dari relawan dari kalurahan yang belum terbentuk Kalurahan tangguh Bencana.



Gambar 3.3 Sosialisasi tatap muka

Pergantian materi baliho berupa disain, cetak dan pemasangan baliho kebencanaan berukuran yakni 4 x 6 meter dan 3 x 2 meter di 5 lokasi yaitu Sanden, Depok, Piyungan, Dlingo dan Imogiri.



Gambar 3. 4 Penggantian Papan Informasi Bencana

Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 dengan narasumber Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Agus Budi Raharja, S.KM.,M.Kes dengan tema Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bantul; Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul Waljito, S.H dengan tema Peran FPRB Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana; dan Suparlan, S.Sos.I, MAC.EIA dengan tema Aksi Antisipasi dengan jumlah tamu undangan 100 orang dari unsur Forkompmda, komunitas relawan dan FPRB atau relawan kalurahan.



Gambar 3.5. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana

Peringatan refleksi gempa dilaksanakan pada tanggal 26 Mei di Aula Pemda II Manding dengan jumlah undangan 150 orang dari Perangkat Daerah dan komunitas relawan. Sambutan disampaikan oleh Ir.Fenty Yusdiaty,M.T. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Narasumber acara tersebut adalah Dr.Ir.Jatmiko Setyawan,M.T.,IPM dosen UPN Veteran Yogyakarta dengan tema Karakteristik Geologi dan Tektonik Wilayah Kabupaten Bantul; Prof.H.Sarwidi, Ph.D. dari Universitas Islam Indonesia dengan tema Rekayasa Struktural untuk Mitigasi Gempa Bumi; dan Arif Rahman dengan tema Bencana Alam dalam Perspektif Agama Islam.



Gambar 3.6. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana

Pengadaan rambu kebencanaan dilaksanakan di 6 lokasi sepanjang pantai selatan Kabupaten Bantul yakni: Pantai Parangtritis, Parangtritis Baru, Parangkusumo, Tall Wolu, Cemoro Sewu, dan Depok. Total anggarannya Rp.30.650.000,00 dan dilaksanakan pada bulan Juni. Ukuran rambu adalah 1,5 meter x 2 meter dengan materi peringatan rawan bencana tsunami.



Gambar 3. 7 Pengadaan rambu kebencanaan

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sasaran kegiatan ini adalah Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 65% terealisasi 65%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.1.876.144.700,- terealisasi Rp.1.801.165.480,- atau 96,00%. Kegiatan ini didukung oleh 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.43.864.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.157.492,- atau 91,55 %. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah persentase jumlah warga negara yang termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang mendapatkan pelatihan. Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana dilaksanakan sebanyak 2 kali. Peserta pelatihan berasal dari relawan dan aparatur internal BPBD Bantul dengan masing-masing berjumlah 50 orang. Pelatihan relawan FPRB dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2024, sedangkan pelatihan aparatur internal dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2024 di Aula Dinas Perpustakaan. Materi yang disampaikan adalah *Damage Assesment*, Pengambilan Dokumentasi, Perhitungan Estimasi Dampak, dan Laporan *Assesment* dengan narasumber dari BPBD DIY. Materi Pertolongan Korban Banyak atau Triage serta praktek dari PKU Muhammadiyah Bantul.



Gambar 3. 8 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

(2). Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.463.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.458.882.993,- atau 99,00%. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 12 laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) sesuai dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya dan tercapai sebanyak 12 dokumen atau 100%.

Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota secara umum dilaksanakan dalam bentuk:

- Rapat-Rapat Pengendalian Operasi

Rapat-rapat pengendalian operasi dilaksanakan pada saat kondisi normal, sebelum adanya kejadian, maupun saat terdapat kejadian membahayakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut berasal dari internal BPBD Kabupaten Bantul, khususnya Pusdalops PB, bersama dengan Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Satgas Tim Reaksi Cepat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Seluruh aktivitas rapat ini dilaksanakan di lingkungan BPBD Kab. Bantul sepanjang tahun 2024 sejak bulan Januari sampai dengan Desember.



Gambar 3. 9 Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi

- Pekerjaan Interior Ruang Pusdalops PB
Pekerjaan desain interior dilakukan selama 30 hari kalender mulai tanggal 20 Oktober sampai dengan 18 November 2024 oleh penyedia yang diperoleh melalui metode *e-purchasing*. Desain interior sendiri meliputi desain tembok utama, meja kerja dan rapat personil, lemari utama, dan kabinet untuk radio rig.



Gambar 3. 10 Pekerjaan Interior Ruang Pusdalops PB

- Penyediaan Peralatan Pendukung Operasional Pusdalops PB
Peralatan pendukung yang disediakan meliputi 6 buah monitor untuk dipasang di dinding utama Ruang Pusdalops PB dan 1 buah *harddisk* eksternal untuk mendukung penyimpanan data. Penyediaan layar dilakukan dengan metode *e-purchasing*, sedangkan penyediaan *harddisk* eksternal dilakukan dengan metode pengadaan langsung.



Gambar 3. 11 Pengadaan Monitor Pusdalops PB

- Pencetakan Peta Pendukung Operasional Pusdalops PB
Peta yang dicetak adalah hasil Kajian Risiko Bencana yang meliputi: Peta Bahaya Gempa Bumi; Peta Bahaya Tsunami; Peta Bahaya Tanah Longsor; Peta Bahaya Banjir; Peta Bahaya Cuaca Ekstrem; Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan; Peta Bahaya Likuifaksi; Peta Bahaya Kekeringan; Peta Multibahaya; dan Peta Kerentanan Multibahaya.
- Pengecatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami Poncosari
Pekerjaan pengecatan dilakukan selama 30 hari kalender mulai tanggal 20 Oktober sampai dengan 18 November 2024. Pengecatan

dilakukan terhadap sebagian tembok interior dan eksterior TES Tsunami Poncosari seluas 3659,84 m², termasuk tembok pagar dan pos satpam.



Gambar 3. 12 Pengecatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami Poncosari

(3). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.996.858.200,- dan terealisasi sebesar Rp.958.765.637,- atau 96 %. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan penanggulangan bencana berupa 6 jenis barang sejumlah 37 Unit/buah dan tercapai sebanyak 100% yang berupa :

Tabel 3. 7 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2024

No	Jenis Barang	Volume
1.	Kendaraan Roda 3	8 Unit
2.	Winch/LIR Spesifikasi : 4,3 ton	1 Unit
3.	Helm Savety	11 Buah
4.	Handphone	1 Unit
5.	Set kunci toolkit	1 Set
6.	Wearpark Coverall	15 Unit



Gambar 3. 13 Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2024

(4). Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.63.289.000,- dan terealisasi sebesar Rp.62.869.000,- atau 99,43%. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 2 Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan tercapai sebanyak 2 kawasan (gempa bumi dan tsunami) atau 100%.

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara umum dilaksanakan dalam 1 (satu) bentuk aktivitas, yakni Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Pembentukan SPAB terlaksana dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024. Pembentukan SPAB dilakukan pada 2 satuan pendidikan, yakni SMP Negeri 1 Sanden dan SMP Negeri 2 Srandakan. Aktivitas Pembentukan SPAB di masing-masing satuan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam 11 kali pertemuan.



Gambar 3. 14 Aktivitas Pengembangan SPAB di SMP Negeri 1 Sanden



Gambar 3. 15 Aktivitas Pengembangan SPAB di SMP Negeri 2 Srandakan

(5). Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.34.200.000,00 atau 68%. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 135 peserta dan tercapai sebanyak 135 atau 100 %. Bentuk aktifitas sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC PB lintas Sektor Kabupaten Bantul.
- Rapat Koordinasi TRC lintas sektor.
- Pelatihan Pengoperasian Drone Air
- Pelatihan *Public Speaking*.



Gambar 3.16 Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC PB lintas Sektor Kabupaten Bantul



Gambar 3.17 Koordinasi TRC lintas sektor



Gambar 3.18 Pelatihan Drone Air



Gambar 3.19 Pelatihan Public Speaking

(6). Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.60.342.000,- dan terealisasi sebesar Rp.54.904.500,-. Indikator sub kegiatan ini adalah 250 peserta dan tercapai sebanyak 235 atau 94%. Tahapan pelaksanaan gladi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Tahapan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan

No	Tahapan Aktivitas	Pelaksanaan
1.	Sosialisasi pemangku kepentingan dan stakeholder	29 Mei 2024
2.	Sosialisasi kepada masyarakat pelaku	5 Juni 2024
3.	Pelatihan Posko atau Gladi Posko	20 Juni 2024
4.	Gladi Lapang	23 Juni 2024



Gambar 3. 20 Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan

(7). Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.108.809.500,- dan terealisasi sebesar Rp.173.897.350,- atau 96,18%. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal dan terealisasi sebanyak 0,95 atau mencapai 95%. Rincian pelaksanaan penyusunan dokumen RPB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Progres Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPB.

No	Target Capaian	Lingkup	Mutu Layanan	Bobot (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	a. Periode penyusunan	1. Periode 5 (lima) tahunan	1	1
			2. Pambaruan atas kejadian bencana besar	1	1
		b. Identifikasi akar masalah	1. Akar masalah pada elemen berisiko hidrometeorologi daerah	2	2
			2. Akar masalah pada elemen risiko geologi daerah	2	2
			3. Akar masalah pada elemen risiko ekonomi, sosial dan budaya daerah	2	2
			4. Akar masalah pada elemen risiko kesehatan masyarakat	2	2
			5. Indikator yang harus dipenuhi berdasarkan Indeks Ketahanan Daerah	2	2
		c. Penetapan kebijakan strategis	1. Korelasi dengan strategi RPJMN yang berlaku	1	1
			2. Korelasi dengan RPJMD Provinsi yang berlaku	1	1
			3. Korelasi dengan visi misi Kepala Daerah / RPJMD yang berlaku	1	1
			4. Strategi untuk menyelesaikan akar masalah	1	1
			5. Strategi untuk mencapai Indeks Ketahanan Daerah	1	1
		d. Penetapan Rencana Aksi	1. Aksi pengurangan risiko bencana	2	2
			2. Kerangka Aksi Penanganan Darurat Bencana	2	2
			3. Kerangka Aksi Penanganan Paska Bencana	2	2
			4. Pelaksana dan pendukung implementasi aksi	2	2
			5. Indikator keberhasilan aksi	2	2
			6. Rencana tahun pelaksanaan aksi	2	2
			7. Kesesuaian strategi dan akar masalah	2	2
		e. Penetapan lokasi pelaksanaan aksi	1. Gambaran kawasan tempat timbulnya akar masalah	1	1
			2. Lokasi pelaksanaan aksi-aksi pengurangan risiko bencana	1	1
		f. Penetapan strategi pengarusutamaan	1. Rencana kerja untuk menjamin implementasi aksi	1	1
			2. Rencana pengintegrasian PRB ke dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	1	1
			3. Pelibatan kelompok akademisi, media, dunia usaha, filantropi dan ormas selain lembaga eksekutif dan legislatif daerah untuk implementasi aksi	1	1
		g. Rencana Monitoring & Evaluasi Implementasi RPB	1. Mekanisme monitoring dan evaluasi	2	2
			2. Tim monitoring evaluasi	2	2
2.	Legalitas Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	a. Keterwakilan	Peserta diskusi publik minimal setingkat kepala seksi di pemerintahan atau sederajat, berasal dari elemen: 1) Pemerintah, 2) Masyarakat, 3) Dunia Usaha, 4) Akademisi dan 5) Jurnalis	10	10
			1. Aksi prioritas	5	5
		b. Prioritas Aksi	2. Periode pelaksanaan aksi prioritas	5	5
			3. Kawasan prioritas	5	5
		c. Berita Acara	1. Kesepakatan prioritas aksi	5	5

No	Target Capaian	Lingkup	Mutu Layanan	Bobot (%)	Capaian (%)
			2. Kesepakatan prioritas kawasan	5	5
			3. Kesepakatan mekanisme pengarusutamaan	5	5
			4. Kesepakatan mekanisme monitoring dan evaluasi	5	5
			5. Pembaruan Rencana Penanggulangan Bencana	5	5
		d. Dokumen Legal	Dokumen legal Rencana Penanggulangan Bencana yang disepakati oleh seluruh komponen pemerintah dan non pemerintah	10	5
Total Kinerja				100	95

(8). Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.17.482.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.482.000,- atau 100,00%. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam sebanyak 20 keluarga terealisasi 20 keluarga atau 100%.

Peserta dari kegiatan ini adalah Ibu-Ibu PKK dari Dusun Nogosari. Pelatihan Keluarga Tanggap berlangsung selama 4 hari penyampaian materi oleh narasumber, *Focus Group Discussion*, dan praktek pemasangan arah jalur evakuasi tingkat rumah tangga.



Gambar 3.21 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sasaran kegiatan ini adalah Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan target 100% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.441.108.000,- terealisasi Rp.421.882.500,- atau 95,64%. Kegiatan ini didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.5.000.000,- terealisasi Rp.1.200.000,- atau 24%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas dengan target 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan atau 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rapat koordinasi pada tanggal 30 April 2024 dan rapat evaluasi kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis prioritas dan tanggal 11 Desember 2024 di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Bantul yang dihadiri oleh BPBD, Dinas Kesehatan, DKPP, dan BAPPEDA. Bentuk kegiatan yaitu berupa hasil laporan 2 rapat yaitu: rapat koordinasi

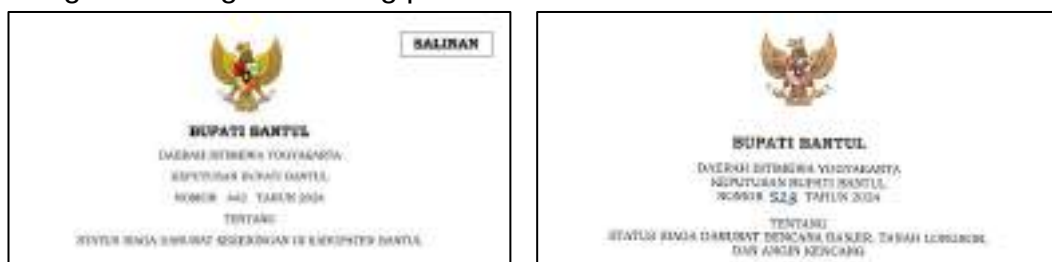
dan evaluasi kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis prioritas pada tahun 2024.



Gambar 3.22 Rapat Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

(2). Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.12.050.000,- terealisasi Rp.9.650.000,- atau 80,08%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SK penetapan status bencana dan SKPD yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat dengan target 2 dokumen, realisasi 2 dokumen atau 100%. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi rapat koordinasi internal dan lintas sektor tindak lanjut dampak cuaca ekstrim dan penanganan saat kejadian dampak cuaca ekstrim di fase darurat. Rapat koordinasi dilaksanakan pada bulan Januari, Februari dan Desember. Penanganan kejadian dampak cuaca ekstrim dilaksanakan pada bulan Maret dan Oktober 2024 yang dihadiri oleh stakeholder terkait. Bentuk kegiatan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Siaga Darurat Kekeringan dan Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang pada tahun 2024.



Gambar 3.23 Surat Keputusan Bupati Bantul terkait Penetapan Status Darurat Bencana Tahun 2024

(3). Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.58.188.000,- terealisasi Rp.58.184.000,- atau 99,99%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana dengan target 100%, realisasi 100% atau 100%

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan setiap bulan pada saat terjadi bencana seperti dampak hujan deras dan angin kencang, tanah longsor, gempa bumi dan kekeringan. Selain penanganan kejadian bencana juga ada assessment dan monitoring lokasi terdampak bencana serta kerja bakti

sebagai pengurangan resiko bencana. Untuk pelaporan juga dilaksanakan setiap selesai penanganan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.



Gambar 3.24 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024

(4). Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.188.570.000,- terealisasi Rp.181.606.500,- atau 96,31%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target 100%, realisasi 100% atau 100%. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota merupakan kegiatan untuk penyediaan dan penyaluran logistik dan peralatan yang diperuntukan support korban terdampak bencana dan dukungan operasional penanganan bencana di Kabupaten Bantul selama tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan setiap bulan pada saat terjadi bencana dan ada masyarakat yang menjadi korban terdampak dari bencana yang terjadi untuk mengurangi sedikit beban masyarakat. Pelaporan dilaksanakan setiap selesai penanganan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024. Bentuk kegiatan yaitu berupa penyediaan berupa logistik bahan mentah, air bersih, bronjong, terpal dan rak penyimpanan. Selanjutnya disimpan di stok opname dan bila ada korban bencana dan untuk dukungan operasional akan dilaksanakan penyaluran barang-barang tersebut.



Gambar 3.25 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024

(5). Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.1.575.000,- terealisasi Rp.1.062.500,- atau 67,46%. Indikator sub kegiatan ini adalah SK penetapan status

darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu dengan target 0 dokumen terealisasi 0 dokumen atau 100%.

Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah Penyakit merupakan kegiatan koordinasi saat terjadi kejadian bencana non alam pandemi/wabah penyakit di Kabupaten Bantul selama tahun 2024. Pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi kejadian bencana non alam pandemi/wabah dilaksanakan di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Bantul pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 yang dihadiri oleh BPBD dan Dinas Kesehatan. Bentuk kegiatan yaitu berupa hasil laporan rapat koordinasi bencana non alam pandemi/wabah pada tahun 2024.

(6). Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.175.725.000,- terealisasi Rp.170.179.500,- atau 96,84%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan atau 100%.

Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan kegiatan aktivasi pos siaga darurat bencana yang bertujuan untuk penanganan tercepat bila ada kejadian bencana di Kabupaten Bantul selama tahun 2024. Menyiapkan pengadaan peralatan dan vitamin untuk mendukung operasional kegiatan penanganan bencana. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di bulan Januari sampai dengan Februari masih dengan Pos siaga tahun 2023 yaitu 36 Pos. Sedangkan di bulan November dilaksanakan aktivasi pos siaga dengan 75 Pos siaga darurat bencana masing-masing Kalurahan dan 1 Pos Induk yang berpotensi terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang. Setiap Pos mendapatkan jasa transport yang diterima sesuai jadwal piket dan dukungan logistik untuk support kegiatan. Bentuk kegiatan yaitu berupa Aktivasi 75 Pos Siaga Darurat Bencana di setiap Kalurahan se- Bantul.



Gambar 3.26 Koordinasi Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2024

d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sasaran kegiatan ini adalah Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan target 82% terealisasi 82%. Pagu anggaran kegiatan ini

Rp.244.429.950,- terealisasi Rp.173.677.250,- atau 71,05%. Kegiatan ini didukung oleh 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.350.000,- atau 57,24%. Indikator sub kegiatan ini adalah 2 Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dan tercapai sebanyak 1 draft Raperbup yang sudah melalui proses harmonisasi dengan Kanwil Hukum DIY dan 2 draft Raperbup yang sedang menunggu jadwal harmonisasi dengan Kanwil Hukum DIY atau 75%.



Gambar 3.27 Rapat Pembahasan Draft Raperbup Pedoman Pembentukan FPRB

(2). Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.200.000 atau 100%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dengan target 1 dokumen tercapai sebanyak 1 dokumen atau 100%.

Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten Bantul secara umum dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi antar lembaga penanggulangan yang tergabung dalam Forum Penurunan Risiko Bencana Kabupaten Bantul. FPRB Kabupaten Bantul terdiri dari unsur pemerintah selaku pelindung, pembina dan pengarah, unsur FPRB Kalurahan, dan unsur organisasi kemanusiaan sebagai anggota.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Tahun 2024 yang dilaksanakan meliputi:

- Rapat persiapan pengukuhan pengurus baru.
- Pengukuhan Pengurus FPRB Kabupaten Bantul masa bhakti 2024-2028 oleh Bupati Bantul.
- Pertemuan Pra Rapat Kerja FPRB Bantul
- Rapat Kerja Pengurus FPRB Kabupaten
- Pembentukan Pengurus Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) Kabupaten Bantul.
- Pertemuan Pra Rapat Kerja FPRB Bantul
- Pertemuan Koordinasi FPRB Kabupaten

(3). Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.200.000,00 atau 100 %. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%. Dokumen kerjasama tersebut adalah *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul dengan Tim PKK Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri. Kegiatan berupa rapat koordinasi dengan Lurah Kalurahan Wukirsari dan Tim PKK Kalurahan Imogiri.

(4). Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.500.000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersedia dengan target 12 Dokumen dan tercapai sebanyak 12 Dokumen dalam bentuk data kejadian bulanan atau 100%.

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan secara umum dilaksanakan dalam bentuk rapat/pertemuan rutin antara wali data pendukung BPBD Kabupaten Bantul dengan pengelola data Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Pusdalops PB. Rapat/pertemuan tersebut seluruhnya dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Bantul. Topik diskusi dalam setiap rapat/pertemuan adalah pengisian tabel data kebencanaan untuk dikirim ke Wali Data Sedata Sebantul, termasuk pembahasan kendala dan usulan perbaikan untuk Sedata Sebantul.



Gambar 3.28 Rapat Tim Data BPBD Kab. Bantul

(5). Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.400.000,00 atau 100%. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Laporan hasil binwas penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan tercapai sebanyak 1 laporan dengan realisasi 1 laporan atau 100%.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk Penilaian Ketangguhan desa dengan jadwal 3 kali angkatan. Angkatan Penilaian Ketangguhan Desa dilaksanakan di Kantor Kapanewon Sewon pada tanggal 28 Maret 2024 dengan peserta dari kalurahan-kalurahan dari Kapanewon Banguntapan, Sewon, Piyungan, Kasihan, Bantul. Penilaian angkatan kedua dilaksanakan di Kantor Kapanewon Pandak dengan peserta dari kalurahan-kalurahan di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Srandakan, Sanden, Pandak, Bambanglipuro, dan Kretek. Penilaian angkatan 3 dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 di Kantor Kapanewon Imogiri dengan peserta dari Kalurahan-kalurahan kapanewon Dlingo, Pleret, Pundong, Jetis, dan Imogiri.

Output Penilaian Kapasitas Daerah Kabupaten Bantul adalah nilai ketahanan kalurahan yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu:

- Tangguh Pratama dengan nilai IKD kurang dari 58,33;
- Tangguh Madya dengan nilai IKD 58,33 sampai 83,33;
- Tangguh Utama dengan nilai IKD lebih dari 83,33.

Kalurahan yang masuk dalam kategori Tangguh Utama berjumlah 22 kalurahan; kategori Tangguh Madya 30 kalurahan dan 19 kalurahan masuk dalam kategori Tangguh Pratama sedangkan 4 kalurahan tidak hadir dan tidak mengisi.



Gambar 3.29 Aktivitas Penilaian Indeks Ketangguhan Desa

(6). Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.14.060.000,- terealisasi Rp.13.135.000,- atau 93,42%. Indikator sub kegiatan ini adalah: Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebanyak 40 orang terealisasi 40 orang atau 100%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Mei 2024 di Gedung Serbaguna Kantor Perpusda Kabupaten Bantul dengan jumlah peserta 40 dari Kesbangpol; BPKPAD; Dinas Kesehatan; DKPP BAPPEDA; DIKPORA; DINPAR; DPUPKP; DISKOMINFO; DKUKMPP; DISDUKCAPIL; DLH; DINSOS; DISBUD; DISHUB; DPMK; SATPOLPP; 17 Kapanewon; RSUD; PDAM; PLN; Staf Bidang Kedaruratan, Logistik,

Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi; Staf Sekretariat; SATGAS PUSDALOPS dan SATGAS TRC.

Materi hari pertama: Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan Pembentukan TIM Jitupasna. Materi hari kedua: Penyusunan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) dan Peranan dan tugas TIM Kapanewon dan OPD dalam Menyusun R3P dan Simulasi Pasca Bencana.



Gambar 3.30 Bimbingan Teknis Pascabencana

(7). Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.9.250.000,- terealisasi Rp.1.512.500,- atau 16,35%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan sebanyak 5 kegiatan terealisasi 2 kegiatan atau 40%.

Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota merupakan kegiatan rapat koordinasi dan penanganan Pascabencana di Kabupaten Bantul selama tahun 2024. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rapat koordinasi pada tanggal 13 Mei 2024 di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Bantul yang dihadiri oleh BBWSSO; BPKPAD; BAPPEDA; DPUPKP; Sekretaris; Jabfung Sekretariat; Kabid., Jabfung dan Staf Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi; Staf Sekretariat; SATGAS PUSDALOPS dan SATGAS TRC. Pelaksanaan SPPD ke BPBD DIY untuk Rapat Koordinasi dan Sosialisasi. Bentuk kegiatan yaitu berupa hasil laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pekerjaan Dampak Cuaca Ektrim dengan Anggaran BTT dan Tindak Lanjut Laporan Warga terkait Tanah Longsor wilayah Sungai Winongo di Dusun Code, Kalurahan Tlirenggo, Kapanewon Bantul.



Gambar 3.31 Koordinasi Penanganan Pascabencana

(8). Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.24.210.000,- terealisasi Rp.1.062.500,- atau 4,39%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 dokumen terealisasi 0 dokumen atau 0%. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2024 tidak terjadi bencana dalam skala masif di Kabupaten Bantul. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rapat koordinasi pada tanggal 19 Desember 2024 di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Bantul.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah *Bantul Integrated Sirine System* (BISS) merupakan media diseminasi informasi tsunami yang didapatkan dari BMKG kepada masyarakat melalui perintah suara secara langsung. Inovasi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan sudah dijadikan rujukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengesahan Standar Nasional Indonesia SNI dituangkan dalam SNI 8040:2017 tentang Sirine Peringatan Dini Tsunami.



Gambar 3. 32 Standar Nasional Indonesia SNI 8040:2017 tentang Sirine Peringatan Dini Tsunami

2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Berdasarkan hasil perhitungan waktu tanggap (*response time*) tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan (satuan menit)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan.	8,19	14,40	8,50	140,97	14,36	140,81

Sumber : Data diolah BPBD Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 14,40 realisasi sebesar 8,50, tercapai 140,97% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 14,36 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 140,81% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 secara umum sudah dapat memenuhi target waktu capaian dibawah 15 menit sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran. Realisasi Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 mengalami peningkatan waktu sebesar 19 detik atau sebesar 3,79% dari tahun 2023. Rincian pelaksanaan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Response Time Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 dan 2024 di Wilayah DIY

No	Bulan	2023				2024			
		BPBD		Relawan		BPBD		Relawan	
		Jumlah Kejadian	Response Time	Jumlah Kejadian	Response Time	Jumlah Kejadian	Response Time	Jumlah Kejadian	Response Time
1.	Januari	6	06:40	4	06:45	9	09:13	4	10:15
2.	Februari	6	06:50	5	05:48	4	09:00	1	11:00
3.	Maret	5	08:12	2	11:00	3	10:20	7	09:34
4.	April	8	08:08	2	08:30	14	08:26	1	08:00
5.	Mei	13	09:32	5	08:12	12	06:50	1	07:00
6.	Juni	20	07:42	2	04:00	12	07:40	2	13:00
7.	Juli	30	08:16	9	07:07	23	06:55	2	09:00
8.	Agustus	36	09:12	8	08:30	67	08:47	3	09:40
9.	September	48	08:49	3	07:00	40	09:31	6	09:20
10.	Oktober	51	09:02	9	09:40	52	08:38	3	05:00
11.	November	37	08:42	3	07:40	10	07:54	4	08:45
12.	Desember	14	09:13	2	06:00	6	04:20	2	06:30
Rerata		8:11				8:30			

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Capaian Indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 secara umum sudah termasuk baik namun ada hal yang perlu ditingkatkan yaitu penambahan cakupan layanan pemadaman dan penyelamatan di 2 wilayah yang belum masuk dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kapanewon Srandakan dan Dlingo.

Permasalahan:

1. Kelembagaan Sub Urusan Kebakaran belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Keterbatasan SDM dan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
3. Koordinasi lintas Sektor dalam Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan masih perlu ditingkatkan.

Solusi :

1. Optimalisasi kelembagaan yang ada dengan memperkuat Kerjasama antar daerah dan peran Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) .
2. Pemenuhan SDM dan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara bertahap.
3. Optimalisasi fungsi koordinasi dan komando dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan Sub Urusan Kebakaran.
- b. Penambahan cakupan dan kualitas layanan pemadaman dan penyelamatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari satu program yaitu:

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sasaran program ini adalah persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target sebesar 100% tercapai sebesar 100% atau 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan ini adalah Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dengan target 100% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.1.982.582.350,- terealisasi Rp.1.878.524.796,- atau 94,75%. Kegiatan ini didukung oleh 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 9.610.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.610.000,- atau 100 %. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah

Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.

Sub Kegiatan ini meliputi:

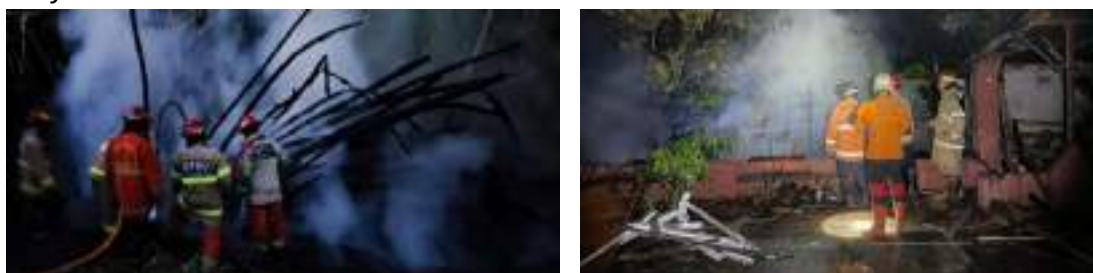
- Rapat koordinasi internal
Koordinasi dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 yang diikuti oleh Unsur pimpinan BPBD Kabupaten Bantul ,Sekretaris BPBD Kabupaten Bantul, Jabatan Fungsional pemadam Kebakaran, Komandan Operasi Pemadam Kebakaran, Komandan Sektor Pemadam kebakaran dan Penyelamatan, Seluruh anggota pemadam kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul
- Penyusunan SOP Pemeriksaan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran Dan Sarana Penyelamatan



Gambar 3.33 Rapat Koordinasi Internal Pemadam dan Penyelamatan

(2). Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 160.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 159.621.970,- atau 99,76%. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 12 laporan dan tercapai sebanyak 12 laporan atau 100%. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan operasional kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam melaksanakan pelayanan, pencegahan, pengendalian kebakaran di Wilayah Kabupaten Bantul. Sub Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk belanja BBM operasional kendaraan, logistik makanan dan minuman operasional 7 (tujuh) Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta belanja isi ulang tabung gas LPG dan pembayaran jasa pengelolaan sampah di Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.



Gambar 3.34 Proses pemadaman kebakaran

(3). Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.910.000,- atau 99,55%. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran dengan target 12 dokumen dan tercapai sebanyak 12 dokumen atau 100%. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan operasional petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas kesiapsiagaan dalam penanganan kejadian kebakaran yaitu berupa makan dan minum aktivitas lapangan.



Gambar 3.35 Proses pemadaman kebakaran

(4). Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.000.000,-, Realisasi Rp.0,- atau 0% dengan indikator sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen terealisasi 0 dokumen atau 0%.

Anggaran pada sub kegiatan ini tidak terserap karena pada tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bantul tidak terjadi kebakaran yang disebabkan oleh bahan berbahaya dan beracun (B3).

(5). Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.4.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.500.000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri dengan target 1 Dokumen dan tercapai sebanyak 1 Dokumen atau 100% dalam bentuk data peralatan sektor.



Gambar 3.36 Proses Penyusunan Standarisasi dan Pendataan Sarpras

(6). Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.761.722.350,- dan terealisasi sebesar Rp.1.660.132.826,- atau 94,23%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sesuai standar teknis terkait dengan target 180 unit barang dan tercapai sebanyak 180 unit alat penunjang evakuasi dan penanganan kebakaran atau 100%.

Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara umum dilaksanakan dalam bentuk pengadaan sarana prasarana penunjang penanganan kebakaran dan alat pelindung diri meliputi:

Tabel 3.12 Daftar Pengadaan Sarpras Kebakaran dan APD Tahun 2024

No	Nama barang	Jumlah
1.	Sepeda motor roda 2	1 unit
2.	Gerinda mini	5 buah
3.	Gergaji chainsaw 14"	2 buah
4.	Alat pemadam	5 buah
5.	Breathing aparatus	3 unit
6.	Nozzle gun 1,5"	7 unit
7.	Nozzle spray 1,5"	10 unit
8.	Piston grip nozzle foam gun 1,5"	3 unit
9.	Selang rubber 1,5x20m	5 roll
10.	Selang rubber 2,5x20m	5 roll
11.	Baju pemadam	14 unit
12.	Sepatu pemadam spesifikasi : tahan panas	4 buah
13.	Y connection 2,5x1,5x1,5"	7 unit
14.	HT	5 unit
15.	Bor beton	1 unit
16.	Carabinner	3 buah
17.	Helm recue	2 buah
18.	Hooligans tools	1 buah
19.	Industrial descender	1 buah
20.	Jumar	4 buah
21.	Mata gerinda beton dan besi	2 buah
22.	Paw rigging plate	1 buah
23.	Sarung tangan	1 buah
24.	Gerinda portabel	1 buah
25.	Baju pemadam tahan panas	12 pcs
26.	Celana pemadam tahan panas	12 pcs

No	Nama barang	Jumlah
27.	Kompresor angin	1 unit
28.	Pompa air	1 unit
29.	Sarung tangan	3 buah
30.	Celana pemadam tahan panas	12 pcs
31.	Nozzle gun 1,5"	14 unit
32.	Half mask 3m	4 unit
33.	Selang rubber 1,5x20m	14 roll
34.	Sepatu pemadam	1 buah
35.	Y connection 2,5x1,5x1.5"	14 unit
36.	Helm rescue pemadam	14 buah
37.	Sepatu harvix	8 buah

(7). Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.22.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.000.000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan target 30 orang dan tercapai sebanyak 30 orang atau 100%. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran secara umum dilaksanakan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petugas Pemadam Kebakaran pada keahlian dalam penanggulangan kebakaran serta penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 April 2024 yang diikuti oleh 30 personel dari Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Joglo Yoso, Palbapang, Bantul, Bantul. Adapun instruktur atau pelatih terdiri dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dan Instruktur atau Pelatih Internal Damkarmat BPBD Kabupaten Bantul.



Gambar 3.37 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

(8). Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.000.000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan

secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan setiap tahunnya dengan target 5 Desa/Kelurahan terealisasi 5 Desa/Kelurahan atau 100%.

Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan secara umum dilaksanakan dalam bentuk rapat/pertemuan antara kelurahan yang telah ditunjuk dengan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 di Kantor BPBD Kabupaten Bantul dengan diikuti oleh perwakilan dari lima (5) Kelurahan yaitu Kelurahan Ngestiharjo, Kelurahan Panjangrejo, Kelurahan Srimulyo, Kelurahan Wukirsari, dan Kelurahan Bantul serta perwakilan dari Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul. Adapun inti dari rapat yaitu koordinasi dan sinkronisasi pelaporan kejadian kebakaran dalam upaya percepatan informasi saat terjadi kebakaran.

(9). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.750.000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini adalah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. Sub kegiatan ini digunakan untuk rapat koordinasi peningkatan kerjasama dan kolaborasi pemadaman kebakaran yang melibatkan semua stakeholder dan lintas Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Sasaran kegiatan ini adalah Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran dengan target 67% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.12.900.000,- terealisasi Rp.12.800.000,- atau 99,22%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp.3.900.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.3.800.000,00,- atau 97,44%. Indikator sub kegiatan ini jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran dengan target 1 dokumen dan tercapai sesuai target yaitu 1 dokumen atau 100%.

Sub kegiatan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran dilaksanakan dalam bentuk inspeksi/pemeriksaan sistem proteksi kebakaran yang terdapat di gedung perusahaan/instansi yang ada di wilayah Kabupaten Bantul meliputi PT. Asia Trade Perkasa, PT. Out Of Asia, PT. Ameya, PT. Maesindo, PT. Exotica, dan PT. Navil natural organik.



Gambar 3.38 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

(2). Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp.9.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.9.000.000,00,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan estándar sarana dan prasarana proteksi kebakaran dengan target 30 dokumen barang dan tercapai sesuai target yaitu 30 unit atau 100%.

Sub kegiatan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran dilaksanakan dalam bentuk pengujian dan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran yang terdapat di gedung/lingkungan instansi pemerintahan Kabupaten Bantul. Instansi tersebut meliputi Gedung Dinas Sosial, Gedung Dinas Kebudayaan, Gedung Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Gedung Dinas Perhubungan, Gedung Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Gedung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Gedung Dinas Lingkungan Hidup, Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman, Gedung Inspektorat, Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Gedung Dinas Pariwisata, Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Gedung Satuan Polisi Pamong Praja.



Gambar 3.39 Proses Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan target 84% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.364.480.000,- terealisasi Rp.362.196.950,- atau 99,37%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.240.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 239.177.000,- atau 99,66 %. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya sebanyak 560 orang atau 100%. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat di tingkat dusun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

No.	Lokasi	Tanggal	Peserta (orang)
1	Ciren Triharjo Pandak	11 Mei 2024	40
2	Gandekan Bantul Bantul	12 Mei 2024	40
3	Kembangsari Srimartani Piyungan	11 Mei 2024	40
4	Munggang Sitimulyo Piyungan	7 Mei 2024	40
5	Baran Srihardono Pundong	4 Mei 2024	40
6	Poyahan Seloharjo Pundong	7 Mei 2024	40
7	Beton Tamantirto Kasihan	5 Mei 2024	40
8	Jipangan Bangunjiwo Kasihan	12 Mei 2024	40
9	Karangtalun Imogiri	11 Mei 2024	40
10	Payaman Imogiri	15 Mei 2024	40
11	Pringgolayan Banguntapan	12 Mei 2024	40
12	Jomblangan Banguntapan	17 Mei 2024	40
13	Klangon Sedayu	21 Mei 2024	40
14	Metes Argorejo Sedayu	22 Mei 2024	40
Jumlah			560

Peserta sosialisasi terdiri dari perwakilan unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Pamong Kalurahan dan perwakilan dusun dengan materi sebagai berikut:

- Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
- Teori dasar api
- Praktek pemadaman kebakaran



Gambar 3.40 Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

(2). Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.34.480.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.469.950,- atau 99,97%. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya sebanyak 2 Kalurahan dengan realisasi

2 kalurahan atau 100% di Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan dan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan.



Gambar 3. 41 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

(3). Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.88.550.000,- atau 98,39%. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarpras Damkar dengan target 8 kalurahan tercapai 8 kalurahan atau 100% dengan rincian penyediaan sarpras sebagai berikut:

- Sepatu pemadam berjumlah 16 buah
- Tabung APAR berjumlah 19 buah
- Handy talky berjumlah 16 unit

d. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan target 100% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.247.386.150,- terealisasi Rp.241.272.142,- atau 97,53%. Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp.195.386.150,00,- dan terealisasi sebesar Rp.189.579.375,00,- atau 97,04%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah saran dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan estándar teknis dengan target 99 unit barang dan tercapai sesuai target yaitu 99 unit atau 100%. .

Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia penyelamatan dan evakuasi secara umum dilaksanakan dalam bentuk pembelian barang dengan pengadaan dan dilaksanakan dengan metode e-purchasing. Adapun sarana prasarana tersebut meliputi:

Tabel 3. 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan

No	Nama barang	Jumlah
1.	Hooligen tools	7 buah
2.	Sarung tangan	15 buah
3.	Tongkat penjepit ular	7 unit
4.	Mekanik tools set kunci toolkit	7 unit
5.	Senter	7 unit
6.	Antena	1 unit
7.	Power supply	3 unit
8.	Kacamata google	35 buah
9.	Helm rescue	15 buah
10.	Tali karmantel	1 roll
11.	Headlamp	8 unit
12.	Helm safety	11 buah

(2). Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal dengan target 1 laporan dan tercapai sebanyak 1 laporan.

Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi secara umum dilaksanakan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam proses penyelamatan dan evakuasi.



Gambar 3. 42 Pelaksanaan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

(3). Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp.4.500.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.4.312.500,00,- atau 95,83%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis dengan target 99 unit barang dan tercapai sesuai target yaitu 99 unit atau 100%.

Sub kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia penyelamatan dan evakuasi secara umum dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke 6 pos sektor pemadam

kebakaran dan penyelamatan yang ada di Kabupaten Bantul guna melakukan kajian terkait keperluan dan pengecekan kelayakan sarana prasarana pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bantul dan Rapat Koordinasi internal.

(4). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.37.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.37.362.267,- atau 99,63%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia dengan target 12 laporan dan tercapai sebanyak 12 laporan atau 100%.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia secara umum dilaksanakan dalam bentuk kegiatan/aktivitas lapangan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul dalam kegiatan operasi penyelamatan pada kondisi yang mengancam keselamatan jiwa. Operasi penyelamatan pada kondisi yang mengancam keselamatan jiwa meliputi penyelamatan pada kecelakaan transportasi, *water rescue*, *animal rescue*, penyelamatan pada ketinggian, penyelamatan pada bangunan runtuh, penanganan pohon tumbang dan kegiatan operasi lainnya yang berkaitan dengan penyelamatan jiwa.



Gambar 3. 43 *Animal Rescue* dan *Human Rescue*

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari sisi kemampuan keuangan daerah atau kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto), jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.17.301.151.467,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 15.774.767.047,00, atau sebesar 91,18%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	2.658.408.700	15,37
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	2.607.348.500	15,07
Jumlah		5.265.757.200	30,44
Belanja Pendukung		12.035.394.267	69,56
Total Belanja		17.620.753.261	100,00

Sumber : Data diolah BPBD Tahun 2025

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.5.265.757.200,00 atau sebesar 30,44% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.12.035.394.267,00 atau sebesar 69,56% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan besaran anggaran 15,37% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 15,07% dari total anggaran belanja.

Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.6.533.169.678,00 terealisasi sebesar 82,11%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 91,18% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 92,66%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,63%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 95,68%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 94,95%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,93	0,72	77,42	2.658.408.700	2.524.048.980	94,95
2	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan	14,4	8,50	140,97	2.607.348.500	2.494.793.888	95,68

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kebakaran dan Penyelamatan						

Sumber : Data diolah BPBD tahun 2025

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 8,82%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 9,37%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,63%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 5,05%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 4,32%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 5,05% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 4,32% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	2.658.408.700	2.524.048.980	134.359.720	5,05
2	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	2.607.348.500	2.494.793.888	112.554.612	4,32
	Jumlah	5.265.757.200	5.018.842.868	246.914.332	9,37
	Belanja Pendukung	12.035.394.267	10.755.924.179	1.279.470.088	10,63
	Total Belanja	17.301.151.467	15.774.767.047	1.526.384.420	8,82

Sumber : Data diolah BPBD tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 109,20% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Komitmen dan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan bencana.
2. Ketersediaan SDM yang memenuhi kualifikasi.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan melalui pengisian unsur pengarah BPBD dan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Legalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat tantangan dan kekurangan yang perlu diperbaiki ke depannya. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan program-program yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami yakin bahwa tujuan penurunan risiko bencana di Kabupaten Bantul dapat tercapai.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANTUL 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Perubahan Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target Indikator Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	14,46 menit	14,44 menit	14,42 menit	14,40 menit	14,38 menit	14,36 menit

Lampiran 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan KH. Wakhid Hasyim Palbapang Bantul, Kode Pos : 55713
Telp. (0274) 368222, Fax. (0274) 6462100
Website : <http://bpbd.bantulkab.go.id> Email : bpbd@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS YULI HERWANTA, ST, MT
Jabatan : Kepala Pelaksana
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KELAKSANA

AGUS YULI HERWANTA, ST, MT
NIP. 19680720 199603 1 003

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jabatan : Kepala Pelaksana
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,93	Triwulan I	0,93
					Triwulan II	0,93
					Triwulan III	0,93
					Triwulan IV	0,93*
2.	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Menit	14,40	Triwulan IV	14,40
					Triwulan II	14,40
					Triwulan III	14,40
					Triwulan IV	14,40*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 12.035.394.267
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.658.408.700
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 2.607.348.500
	Jumlah Anggaran	Rp. 17.301.151.467

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

